

GELIAT INOVASI PENDIDIKAN ISLAM (SEKOLAHISASI PESANTREN DAN PESANTRENISASI SEKOLAH DI PONDOK PESANTREN TEBUIRENG JOMBANG)

Chusnul Chotimah

LAIN Tulungagung

Email: chusnulchotimah75@gmail.com

ABSTRACT

Boarding school faces several challenges in order to maintain its existence, one of which is the usefulness of students in the community, and competition with non pesantren output. However, the boarding school also innovations in the form of public school founded in boarding schools so that students or graduates of the boarding school has a graduate diploma equivalent to non pesantren. In addition, the function of the public schools as well as improving the quality of output boarding. In addition, efforts to require students to stay in the boarding school is also important, because schools are a good place to inheritance traditions. So it is expected such learners on boarding school resulted in the formation of strong Islamic character on self-learners.

Keyword: Islamic Education, Pesantren, School

A. PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang aktivitasnya adalah mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pada pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman

perilaku sehari-hari.¹ Pengertian tradisional di sini menunjukkan bahwa lembaga ini sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pondok pesantren yang pertama didirikan oleh Syeh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1399 M untuk menyebarkan agama Islam di Jawa.² Menilik dari usia pondok pesantren maka dapat dikatakan bahwa pondok pesantren telah menjadi milik budaya bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan, dan telah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.³ Pesantren muncul sebagai sebuah komunitas kehidupan yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas kreatif yang menggunakan pendidikan alternatif yang menggabungkan pendidikan dan pengajaran dengan pembangunan komunitas.⁴

Pondok pesantren akan mampu bertahan jika pondok tersebut melakukan inovasi dan pembaharuan terhadap lembaganya. Untuk menghadapi era modernitas dan dalam rangka mempertahankan eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mampu *survive*, pesantren harus melakukan perubahan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang juga tidak luput dari “hukum” dan tuntutan perubahan tersebut. Terlebih ketika dunia pendidikan memasuki era globalisasi seperti saat ini, maka lembaga pendidikan dihadapkan pada tantangan⁵ dan yang semakin keras yang menuntut kemampuan dan kemampuan untuk menjawabnya. Jika lembaga pendidikan Islam mampu merespon tantangan melalui inovasi-inovasi cerdas dan kreatifnya maka peluang untuk “*survive*” akan sangat besar, namun jika lembaga pendidikan Islam tidak mampu atau

¹ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), 55.

² Ronald Alan Lukens Bull, *A Peacefull Jihad: Javanese Education and Religion Identity Construction*, (Michigan: Arizona State University, 1997), 60.

³ Mastuhu, *Dinamika Sistem...*, 7.

⁴ Lebih lanjut baca Soetjipto Wirosardjono, *The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia* (Berlin: Fredrich-Naumann Stiftung. Indonesian Society for Pesantren and Community Development (P3M), and Technical University Berlin, 1987), 218.

⁵ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, (Yogyakarta: Safiria Insania press, 2003), 9-31.

lamban merespon tantangan modernisasi, maka cepat atau lambat lembaga pendidikan Islam akan tertinggal dan otomatis ditinggalkan masyarakat.

Pondok pesantren Tebuireng merupakan salah satu pondok pesantren yang cukup inovatif dalam merespon dan menghadapi tantangan. Pondok pesantren tersebut melakukan berbagai terobosan dan inovasi untuk mengembangkan pesantrennya agar tetap survive dan dijadikan rujukan masyarakat. Walaupun animo masyarakat sedikit berkurang namun jika tidak ada inovasi, maka akan lebih berkurang lagi. Di samping itu, pondok pesantren ini melakukan inovasi yang berupa membuka pendidikan umum di pondok pesantren. Bahkan sejak zaman K.H. Wahid Hasyim di Pondok Pesantren Tebuireng sudah dimasuki mata pelajaran umum.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan data secara kuantitatif,⁶ dengan paradigma naturalistik atau interpretif. Paradigma naturalistik digunakan karena memungkinkan peneliti menemukan pemaknaan (*meaning*) dari setiap fenomena sehingga diharapkan dapat menemukan *local wisdom* (kearifan lokal), *traditional wisdom* (kearifan tradisi), *moral value* (emik, etik, dan noetik)⁷ serta teori-teori dari subjek yang diteliti.

Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁸

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 2

⁷ Emik bisa diartikan sebagai moral values individual atau personal values, etik adalah ekstrensik dan universal values, noetik adalah moral values kolektif

⁸ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC, 2001), 24.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pondok pesantren Tebuireng Jombang. Dipilihnya pondok pesantren ini karena pondok pesantren ini melaksanakan sekolahisasi pondok pesantren. Pondok pesantren ini melakukan inovasi dengan mengadakan pendidikan umum di pesantren. Sehingga kebanyakan santri pondok pesantren Tebuireng adalah santri yang menempuh pendidikan umum.

Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan pemimpin atau kiai, para ustadz atau guru dan para santri atau siswa Pondok Pesantren Tebuireng. Pemilihan sumber data ini berdasarkan asumsi bahwa merekalah yang terlibat dalam kegiatan proses pendidikan umum di pondok pesantren Tebuireng. Adapun sumber data sekunder adalah dokumen atau bahan tertulis atau bahan kepustakaan, yakni buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, dan koran yang membahas masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian akan dikumpulkan yang *pertama*, melalui teknik observasi, yaitu dengan mengunjungi Pondok Pesantren Tebuireng. *Kedua*, dikumpulkan melalui teknik wawancara, yaitu dengan jalan komunikasi langsung dan melakukan tanya jawab kepada kiai, pengurus dan murid. *Ketiga*, data penelitian akan dikumpulkan melalui dokumentasi, baik dokumen resmi Pondok Pesantren Tebuireng.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menempuh tiga langkah yang terjadi secara bersamaan menurut Miles dan Huberman yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays*), yaitu: menemukan pola-pola hubungan yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan; dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).⁹

⁹ Miles M. B & Huberman A. Mikel, *Qualitative Data Analysis*, (Beverly Hills: SAGE Publication, Inc, 1992), 22

Pengecekan keabsahan data (*trustworthiness*) dalam penelitian ini memakai pendapat Lincoln dan Guba bahwa pelaksanaan pengecekan keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).¹⁰

C. KAJIAN TEORI

Teori Inovasi Pendidikan Islam

Kata inovasi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu inovasi dan pendidikan. Kata inovasi dalam bahasa Inggris “*innovation*” sering diterjemahkan segala hal yang baru atau pembaharuan.¹¹ Inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan, karena hal yang baru itu hasil penemuan. Kata penemuan juga sering digunakan untuk menterjemahkan kata dari bahasa Inggris “*discovery*” dan “*invention*”.

Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru, dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada sebelumnya), serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Dari definisi tersebut dapat dijabarkan beberapa istilah yang menjadi kunci pengertian inovasi pendidikan, sebagai berikut:

- a. “Baru” dalam inovasi dapat diartikan apa saja yang belum dipahami, diterima atau dilaksanakan oleh penerima inovasi, meskipun mungkin bukan baru lagi bagi orang lain.
- b. “Kualitatif” berarti inovasi itu memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali unsure-unsur dalam pendidikan.
- c. “Hal” yang dimaksud dalam definisi tadi banyak sekali, meliputi semua komponen dan aspek dalam subsistem pendidikan. Hal-hal yang diperbaharui pada hakikatnya adalah idea atau rangkaian ide.

¹⁰ YS. Lincoln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hill, California: Sage Publications, 1985), 289-331

¹¹ S. Wojowasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1972).

- d. “Kesengajaan” merupakan unsur perkembangan baru dalam pemikiran pendidik dewasa ini. Pembatasan arti secara fungsional ini lebih banyak mengutarakan harapan kalangan pendidik agar kita kembali pada pembelajaran (*learning*) dan pengajaran (*teaching*), dan menghindarkan diri dari pembaharuan perkakas (*gadgeteering*). Sering digunakannya kata-kata dan dikembangkannya konsepsi-konsepsi inovasi pendidikan dan kebijaksanaan serta strategi untuk melaksanakannya, membuktikan adanya anggapan yang kuat bahwa inovasi dan penyempurnaan pendidikan harus dilakukan secara sengaja dan berencana, dan tidak dapat diserahkan menurut cara-cara kebetulan atau sekedar berdasarkan hobi perseorangan belaka.
- e. “Meningkatkan kemampuan” mengandung arti bahwa tujuan utama inovasi adalah kemampuan sumber-sumber tenaga, uang, dan saran, termasuk struktur dan prosedur organisasi.
- f. “Tujuan” yang direncanakan harus dirinci dengan jelas tentang sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai, yang sedapat mungkin dapat diukur untuk mengetahui perbedaan antara keadaan sesudah dan sebelum inovasi dilaksanakan.

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan inovasi di bidang pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan.

Inovasi dapat diterima atau ditolak oleh seseorang (individu) sebagai anggota sistem sosial, atau oleh keseluruhan anggota sistem sosial, yang menentukan untuk menerima inovasi berdasarkan keputusan bersama atau berdasarkan paksaan (kekuasaan). Dengan dasar kenyataan tersebut maka dapat dibedakan adanya beberapa tipe keputusan inovasi yaitu: (1) keputusan inovasi opsional, (2) keputusan inovasi kolektif, (3) keputusan inovasi otoritas, (4) keputusan inovasi kontigensi.

Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan (implementasi) inovasi pendidikan. Kata

proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tertentu terjadi perubahan.

Beberapa model Proses Inovasi Yang berorientasi pada Individual, antara lain:¹²

- a. Model Lavidge & Steiner, dengan tahapan: Menyadari, Mengetahui, Menyukai, Memilih, Mempercayai, dan Membeli.
- b. Model Colley dengan tahapan: Belum menyadari, Menyadari, Memahami, Mempercayai, dan Mengambil Tindakan

Kesemua hal tersebut di atas merupakan tahapan dalam proses inovasi. Perbedaan keduanya terletak pada starting point, yaitu pada Cooley diawali dari belum menyadari dahulu dengan asumsi bahwa setiap manusia ketika berada dalam suatu lingkungan atau komunitas tidak serta merta langsung menyadari posisi dirinya dan berproses untuk melakukan suatu perubahan, melainkan seseorang tanpa disadari dalam melakukan aktivitas perubahan itu sendiri, baru menyadari akan perubahan sebagai akibat dari aktivitas tersebut.

Teori Pesantren

Istilah pondok berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu atau berasal dari bahasa Arab *fundug*, yang berarti hotel atau asrama.¹³ Sedangkan perkataan pesantren berasal dari kata *santri*¹⁴, dengan awalan *pe-* dan akhiran *-an* yang berarti tempat para santri. Sedangkan menurut Nurcholish Madjid terdapat dua pendapat tentang arti kata

¹² Sa'ud, *Inovasi Pendidikan...*, 20-25

¹³ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi pandangan Hidup kiai* (Jakarta: LP3ES, 1994), 18

¹⁴ Dalam penelitiannya, Clifford geertz berpendapat, kata santri mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti sempit santri adalah seorang murid satu sekolah agama yang disebut pondok atau pesantren. Oleh sebab itu perkataan pesantren diambil dari perkataan santri yang berarti tempat untuk para santri. Dalam arti luas dan umum santri adalah bagian penduduk Jawa yang memeluk Islam secara benar-benar, bersembahyang, pergi ke masjid dan berbagai aktifitas lainnya. Lihat Clifford Geertz, *Abangan Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983), 268. Lihat juga Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, (Malang: Kalimasahada Press, 1993), 4

“santri” tersebut. Pertama, pendapat yang mengatakan beradal dari kata “*shastrī*”, yaitu sebuah kata sanskerta yang berarti melek huruf. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari bahasa jawa “*cantrik*” yang berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemanapun guru itu pergi menetap.¹⁵ Nama “pesantren” sering kali dikaitkan dengan kata “santri” yang mirip dengan istilah bahasa india “*shastrī*” yang berarti orang yang mengetahui buku–buku suci agama Hindu atau orang yang ahli tentang kitab suci.¹⁶

Selanjutnya kata pondok dan kata pesantren digabung menjadi satu sehingga membentuk pondok pesantren. Pondok pesantren menurut Arifin adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama (komplek) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui system pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independent dalam segala hal.¹⁷

Sedangkan Zuhairini memberikan definisi mengenai pondok pesantren adalah tempat murid-murid (disebut santri) mengaji agama Islam dan sekaligus diasramakan di tempat itu.¹⁸ Sedangkan Mahpuddin Noor memberikan definisi pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang minimal terdiri dari tiga unsur, yaitu Kiai/ustadz yang mendidik serta mengajar, masjid dan pondok atau asrama.¹⁹

¹⁵ Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 2006), 21. Lihat juga Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid terhadap Pendidikan Tradisional*, (Ciputat Press: Jakarta, 2002), 62

¹⁶ Fuad Jabali dan Jamhari, *LAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 94 lihat juga dalam Dhofier, *Tradisi pesantren...*, 18

¹⁷ M.Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 240

¹⁸ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 212

¹⁹ Mahpuddin Noor, *Potret Dunia Pesantren: Lintasan Sejarah, Perubahan dan Perkembangan Pondok Pesantren*, (Bandung: Humaniora, 2006), 19

Dari berbagai definisi di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam yang dipimpin oleh seorang Kiai yang mempunyai karismatik dan bersifat independent di mana santri disediakan tempat untuk menginap.

Terdapat lima elemen dasar yang mutlak ada dalam sebuah tradisi pondok pesantren. Lima elemen tersebut antara lain: pondok sebagai asrama santri, masjid sebagai sentral peribadatan dan pendidikan Islam, santri, pengajaran kitab-kitab klasik dan kiai.²⁰

Pondok dan Masjid

Kata pondok berarti kamar, gubuk, rumah kecil yang dalam bahasa Indonesia menekankan kesederhanaan bangunan.²¹ Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa pondok itu berasal dari bahasa Arab *funduq* yang berarti ruang tidur, wisma, atau motel sederhana.²² Dahulu memang tempat asrama bagi para santri tersebut merupakan tempat yang sederhana, namun sekarang telah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga memunculkan berbagai tipologi pondok pesantren.

Sementara masjid berasal dari kata bahasa Arab. Masjid berasal dari pokok *sujudan*, dengan *fi'il madli sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat sembahyang, dan karena berupa *isim makan*, maka diberi awalan “*ma*” yang kemudian berubah kata menjadi *masjidu*. Umumnya dalam bahasa Indonesia huruf “*a*” menjadi “*e*”, sehingga kata masjid ada kalanya disebutkan dengan mesjid.²³ Dalam pendapat yang lain, menurut Yusuf al-Qardhawi, “masjid adalah rumah Allah SWT, yang dibangun agar umat mengingat, mensyukuri, dan menyembah-Nya dengan baik”.²⁴

²⁰ Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, 44. Arifin, *Kepemimpinan Kiai ...*, 5-6

²¹ Ziemek, *Pesantren...*, 18

²² Arifin, *Kepemimpinan Kiai ...*, 6

²³ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, Cetakan V, 1989), 118.

²⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Tuntunan Membangun Masjid*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, ed. Darmadi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 7.

Lembaga-lembaga pesantren di Jawa memelihara tradisi tersebut, bahkan pada zaman sekarang di daerah yang belum begitu terkontaminasi dengan pengaruh, dapat ditemukan kiai yang selalu memberikan wejangan kepada muridnya di masjid. Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah, shalat jum'ah dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Dalam pesantren, kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan yang merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional.²⁵

Santri

Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren.²⁶ Para santri tinggal di pondok yang menyerupai asrama. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencuci, memasak dan lain sebagainya di tempat tersebut.

Dhofier, sesuai dengan pengamatannya, membagi santri menjadi dua kelompok, yaitu: 1) Santri mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. 2) Santri kalong, yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik (*nglajo*) dari rumahnya sendiri.²⁷

Kiai

Kiai bukan berasal dari bahasa Arab melainkan dari bahasa Jawa. Kata-kata kiai mempunyai makna yang agung, keramat dan dituahkan. Untuk benda-benda yang dikeramatkan dan dituahkan di Jawa seperti keris, tombak, dan benda lain yang keramat disebut kiai. Selain untuk benda, gelar kiai juga diberikan kepada laki-laki yang lanjut usia, arif dan dihormati di Jawa.²⁸

²⁵ Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, 49

²⁶ Arifin, *Kepemimpinan Kiai ...*, 11

²⁷ Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, 51-52

²⁸ *Ibid.*, 13. Lihat juga Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, 55

Namun pengertian paling luas di Indonesia, sebutan kiai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, yang sebagai muslim terpelajar telah membaktikan hidupnya untuk Allah serta menyebarkan dan memperdalam ajaran-ajaran pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan.²⁹ Jadi pada dasarnya kiai adalah sebutan bagi orang yang ahli dalam pengetahuan Islam.

Kiai mutlak keberadaannya dalam sebuah pondok pesantren. Tanpa adanya kiai, maka pesantren tersebut tidak dapat berjalan. Dalam sebuah pesantren, kiai mempunyai otoritas penuh. Kiai biasanya mengajar kitab kuning kepada santrinya dengan metode bandongan atau sorogan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pondok Pesantren

Berdasarkan data yang ada ditemukan bahwa tantangan pondok pesantren Tebuireng adalah mencari format yang tepat integrasi antara kurikulum sekolah formal dengan kurikulum sekolah diniyah. Jadi menyelaraskan antara sekolah dengan pondok pesantren itulah yang menjadi tantangan tersendiri.

Terdapat beberapa tantangan yang tengah dihadapi oleh sebagian besar pesantren dalam melakukan inovasi pengembangannya, yaitu:

- a. *Image* pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang tradisional, tidak modern, informal, dan bahkan teropikan sebagai lembaga yang melahirkan terorisme, telah mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk meninggalkan dunia pesantren.
- b. Sarana dan Prasarana penunjang yang terlihat masih kurang memadai. Bukan saja dari segi infrastruktur bangunan yang harus segera di benahi, melainkan terdapat pula yang masih kekurangan ruangan pondok (asrama) sebagai tempat menetapnya santri.

²⁹ *Ibid.*

- c. Sumber Daya Manusia. Sekalipun sumber daya manusia dalam bidang keagamaan tidak dapat diragukan lagi, tetapi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan peranan pondok pesantren dalam bidang kehidupan sosial masyarakat, diperlukan perhatian yang serius.
- d. *Aksesibilitas* dan *networking*. Peningkatan akses dan *networking* merupakan salah satu kebutuhan untuk pengembangan pesantren. Penguasaan akses dan *networking* dunia pesantren masih terlihat lemah, terutama sekali pesantren-pesantren yang berada di daerah pelosok dan kecil.
- e. Manajemen kelembagaan. Pada saat ini masih terlihat bahwa pondok pesantren dikelola secara tradisional apalagi dalam penguasaan informasi dan teknologi yang masih belum optimal.
- f. Kemandirian ekonomi kelembagaan. Kebutuhan keuangan selalu menjadi kendala dalam melakukan aktivitas pesantren, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan pesantren maupun dalam proses aktivitas keseharian pesantren. Tidak sedikit proses pembangunan pesantren berjalan dalam waktu lama yang hanya menunggu sumbangan atau donasi dari pihak luar, bahkan harus melakukan penggalangan dana di pinggir jalan.
- g. Kurikulum yang berorientasi *life skills* santri dan masyarakat. Pesantren masih berkonsentrasi pada peningkatan wawasan dan pengalaman keagamaan santri dan masyarakat. Apabila melihat tantangan kedepan yang semakin berat, peningkatan kapasitas santri dan masyarakat tidak hanya cukup dalam bidang keagamaan semata, tetapi harus ditunjang oleh kemampuan yang bersifat keahlian.

Sekolabisasi Pondok Pesantren

Dari data yang diperoleh dapat dikemukakan bahwa untuk menjaga eksistensi pondok pesantren maka pondok pesantren membuat sekolah umum. Hal tersebut dikarenakan untuk meningkatkan mutu lulusan pesantren, termasuk di pondok pesantren Tebuireng. Gus Dur (Abdurrahman Wahid) mengatakan bahwa

Pondok Pesantren merupakan sebuah subkultur dengan syarat: *pertama*, pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara; *kedua*, kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad dalam bentuk kitab kuning; dan *ketiga*, sistem nilai (*value system*) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.

Bermodalkan ketiga elemen itulah, maka pondok pesantren memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, dan sekaligus sebagai salah satu penopang pilar utama pendidikan di bumi Nusantara ini. Sebab, pondok pesantren telah membuktikan dirinya diterima di tengah-tengah masyarakat dan kiaiinya menjadi panutan. Fenomena ini telah menunjukkan bahwa puluhan ribu bahkan ratusan lebih orang Indonesia yang ikut merasakan pola pembelajaran pondok pesantren.

Bersandikan pada kaidah ushuliyah "*al-muhâfazhah 'ala al-qadîmi ash-shâlih wa al-abdzu bi al-jadîd al-ashlah,*" menempatkan posisi pesantren pada dua fungsi ganda, yaitu: sebagai pewarisan budaya (*agent of conservative*), dan sekaligus sebagai agen perubahan (*agent of change*). Sebagai agen pewarisan budaya (*agent of conservative*), maka melalui pendidikan sistem nilai dan kepercayaan, pengetahuan dan norma-norma, serta adat-kebiasaan dan berbagai perilaku tradisional yang telah membudaya diwariskan pada suatu generasi ke generasi berikutnya.

Atas dasar itulah, ketika Kementerian Agama Republik Indonesia berencana mengkaji standarisasi pendidikan pesantren sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Agama Suryadarma Ali dalam kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasin, Kraton Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 24 Januari 2010 yang lalu, kalangan pesantren sudah merasa siap dengan rencana perubahan kurikulum tersebut. Sebab, dengan bersandikan kaidah ushuliyah di atas, kurikulum pendidikan pesantren sudah sangat siap dengan perubahan sistem pendidikan menuju standarisasi pendidikan pesantren.

Bagi kalangan pesantren, standarisasi pendidikan pesantren tidak hanya sebatas adanya pengakuan legal formal dari Pemerintah terhadap lulusan pesantren. Sebab, pada prinsipnya alumni pesantren “kurang” membutuhkan legal formal seperti itu. Tanpa legal formal dari Pemerintah pun, para lulusan pesantren sudah eksis ditengah-tengah masyarakat dan bahkan diakui keberadaannya. Di samping itu, orientasi para santri dalam memasuki pendidikan pesantren tidak berorientasi pada perolehan legal formal berupa ijazah sebagaimana halnya lembaga pendidikan formal sekolah. Kebutuhan pesantren yang paling utama saat ini adalah bagaimana Pemerintah secara formal mengakui Pondok Pesantren sebagai sub sistem Pendidikan Nasional, sehingga tidak ada lagi diskriminasi terhadap pesantren, baik dalam penetapan anggaran melalui APBN maupun APBD, pengakuan formal ijazah pesantren, dan menjadikan sistem pendidikan pesantren sebagai salah satu tolok ukur pencapaian tujuan Pendidikan Nasional, terutama untuk mengevaluasi pencapaian tujuan iman dan taqwa.

Upaya menghapus diskriminasi tersebut sebenarnya telah dilakukan pemerintah dengan menerbitkan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Hanya saja persoalannya, implementasi PP tersebut perlu disempurnakan, agar tidak mengganggu kekhasan pendidikan pesantren. Misalnya, saat ini beberapa pesantren telah mengikuti Wajar Dikdas dengan keharusan pihak pesantren memasukkan ke dalam kurikulumnya muatan Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Sayangnya, pihak Diknas mengatur bahwa muatan wajib tersebut diselenggarakan secara terpisah, tidak integral dalam sebuah kurikulum pendidikan diniyah di pesantren, termasuk ijazah Wajar Dikdas yang pemerintah terbitkan, di samping ijazah yang diterbitkan oleh pihak pesantren. Pertanyaan beberapa pondok pesantren, kenapa harus ada dua ijazah bagi peserta didik di pesantren? Kenapa pemerintah tidak menganggap cukup dengan ijazah yang diterbitkan pesantren saja?

Sedangkan pada pendidikan diniyah tingkat menengah, sampai saat ini pemerintah mempunyai kebijakan yang berbeda dengan format Wajar Dikdas, yaitu memberikan legalitas (pengakuan/persamaan) tanpa harus menerbitkan ijazah sendiri. Jadi, pemerintah menganggap cukup ijazah yang dikeluarkan pihak pesantren. Beberapa pesantren menganggap model legalitas pemerintah di tingkat pendidikan diniyah menengah ini lebih mendekati rasa keadilan.

Keinginan Departemen/Kementerian Agama yang akan melakukan standarisasi pendidikan pesantren perlu difokuskan pada pengakuan legalitas, peningkatan kualitas dan persamaan hak. Dengan demikian, standarisasi tersebut memberikan jaminan atas keragaman pondok pesantren, termasuk jaminan tidak adanya proses pendangkalan struktural.

Standarisasi pendidikan pesantren dimaksudkan oleh Departemen Agama dilakukan karena selama ini belum ada aturan baku yang bisa dijadikan acuan sistem pendidikan pesantren tersebut. Hal itu dilakukan untuk menanggapi aspirasi alim-ulama, pengelola, dan pengasuh pesantren salafiyah yang sering terkendala masalah administrasi pendidikan, seperti ketiadaan ijazah bagi para alumni.

Pada pendidikan diniyah tingkat menengah (*wustha*), sampai saat ini pemerintah memiliki kebijakan yang berbeda dengan format Wajar Dikdas, yaitu memberikan legalitas tanpa harus menerbitkan ijazah sendiri, jadi Pemerintah menganggap cukup ijazah yang dikeluarkan pihak pesantren. Beberapa pesantren menganggap model legalitas pemerintah di tingkat pendidikan diniyah menengah lebih mendekati rasa keadilan. Keinginan Departemen Agama yang akan melakukan standarisasi pendidikan pesantren perlu difokuskan pada pengakuan legalitas, peningkatan kualitas, dan persamaan hak. Dengan demikian standarisasi tersebut memberikan jaminan atas keragaman pondok pesantren, termasuk jaminan tidak adanya proses pendangkalan struktural.

Pesantren saat ini sudah dianggap sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pengakuan ini sebenarnya cukup menggembirakan bagi kalangan pesantren yang sebelumnya dianaktirikan. Dukungan pendanaan dari pemerintah juga semakin besar bagi pesantren yang memungkinkannya untuk terus berkembang. Namun adanya Peraturan Pemerintah (PP) PP No 55/2007 sebagai penjabaran UU Sistem Pendidikan Nasional dikhawatirkan akan menjebak pesantren pada standarisasi dan reduksi pengajaran agama.

PP tersebut memungkinkan pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang untuk melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Isi SNP tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Keadaan ini dalam jangka panjang akan mengancam eksistensi, karakter dan ciri khas pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan keilmuan dan nilai-nilai agama (*tafaqquh fiddin*), sebagai kontrol sosial dan sebagai agen pengembangan masyarakat.

PP ini hanya cocok untuk sekolah formal sedangkan pendidikan informal dan non formal perlu dibuatkan aturan tersendiri. PP ini sangat besar kemungkinannya akan menempatkan pesantren sebagai lembaga yang harus ditertibkan. Aturan seperti ini akan membunuh dengan adanya standar nasional dan Ujian Nasional (UN). Ukuran-ukuran seperti ini dianggapnya terlalu menyederhanakan dan tidak akan mampu menghadapi kompleksitas permasalahan di pesantren. Kehawatirkan sebagian kalangan pesantren tentang rencana standarisasi pendidikan pesantren adalah adanya reduksi pengajaran agama.

Dengan terbitnya PP ini, pemerintah dinilainya juga abai mempertimbangkan aspek budi pekerti yang harus dimiliki para siswa.

Jika terjadi penurunan nilai moral, maka bukan semata kesalahan orang tua, tapi kesalahan pemerintah yang tidak bijak dalam mengelola pendidikan.

Di pesantren, anak didik sangat ditekankan pada nilai-nilai moralitas seperti keikhlasan dan spiritualitas yang tidak bisa dengan mudah diukur dengan standar yang dibuat dalam PP tersebut. Apa yang ada di pesantren seperti keikhlasan dan spiritualitas mendorong kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jiwa keikhlasan sudah menjadi tuntunan.

Ini berbeda sekali dengan sistem *boarding school*, meskipun sama-sama diasramakan layaknya pesantren, motif dan tujuan pembelajarannya sangat berlainan sehingga bisa distandarkan dengan PP tersebut. Diakuinya saat ini memang terjadi perubahan kebijakan terhadap orang-orang yang akan duduk dalam jabatan publik seperti perlunya persyaratan ijazah bagi politisi, lurah, bupati dan lainnya. Pesantren dalam hal ini juga harus luwes dan mampu mengakomodasi kepentingan santri yang berminat meniti karir di sektor publik. Meskipun begitu, ciri khas pesantren tak boleh dihilangkan. Kita harus bebas intervensi dari siapa pun. Sebab pesantren telah memberikan sumbangan yang besar dalam pelayanan publik

Pesantrenisasi Sekolah

Selain itu, terjadi fenomena yang berbeda di pondok pesantren Tebuireng, terutama di pondok pesantren Tebuireng dua. Di sana terdapat kebijakan bahwa setiap peserta didik yang berada di sekolah tersebut wajib berada di pesantren. Maka dari itu, peneliti menyebut lembaga tersebut mengadakan pesantrenisasi sekolah. Kebijakan tersebut merupakan upaya inovatif yang dilakukan pihak pengelola pendidikan.

Upaya pesantrenisasi sekolah dimaksudkan supaya peserta didik tetap memegang nilai-nilai salafiyah dan tetap memegang teguh tradisi. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Dhofier, bahwa keunggulan pondok pesantren yang berbeda dengan lembaga yang lain yaitu pewarisan tradisi kepada generasi sesudahnya. Indegenousitas

pesantren kontras berbeda dengan praktek pendidikan pada intitusi pendidikan lainnya, sehingga dinamika sekaligus problematika yang muncul kemudian, juga menampilkan watak yang khas dan eksotik. Di tengah pergulatan masyarakat informasional, pesantren 'dipaksa' memasuki ruang kontestasi dengan institusi pendidikan lainnya, terlebih dengan sangat maraknya pendidikan berlabel luar negeri yang menambah semakin ketatnya persaingan mutu out-put (keluaran) pendidikan. Kompetisi yang kian ketat itu, memosisikan institusi pesantren untuk mempertaruhkan kualitas out-put pendidikannya agar tetap unggul dan menjadi pilihan masyarakat, terutama umat Islam. Ini mengindikasikan, bahwa pesantren perlu banyak melakukan pembenahan internal dan inovasi baru agar tetap mampu meningkatkan mutu pendidikannya. Aspek pembenahan inilah yang segera direspon oleh pondok pesantren Sidogiri dengan mendirikan beberapa lembaga alumni, dimana lembaga tersebut menampung dan pondok pesantren Tebuireng dengan melatih santrinya dengan ketrampilan wirausaha.

Tantangan pondok pesantren, sebagaimana dikemukakan di atas, adalah membentuk santri yang alim, berakhlak dan mampu berguna di masyarakat. Berguna di sini maksudnya adalah tidak menjadi beban dan sampah masyarakat. Santri yang mampu diberdayakan untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan profesional di bidangnya. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Salahuddin Wahid dalam bukunya, problema pendidikan akhlak dari lulusan lembaga pendidikan di Indonesia termasuk pesantren.³⁰ Santri diharapkan lebih berakhlak sehingga dapat dijadikan contoh atau teladan dan mampu berguna untuk masyarakat. Akhlak sangat penting bagi santri, karena menunjukkan profil lulusan pesantren. Tanpa menunjukkan akhlak yang baik, maka lulusan pesantren tidak akan diterima di masyarakat.

³⁰ Salahuddin Wahid, *Transformasi Pesantren Tebuireng: Menjaga Tradisi di Tengah Tantangan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 85.

Sementara itu, masalah kebermanfaatan santri atau nilai guna santri nampaknya menjadi masalah dan tantangan pondok pesantren. Rata-rata pondok pesantren mengemukakan, harapannya adalah santri tersebut mempunyai kompetensi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi santri sepulang dari pondok pesantren diharapkan mampu membimbing masyarakat dan mengamalkan ilmunya di masyarakat tersebut. Maka dari itu, pondok pesantren perlu mengadakan pembaharuan metode pembelajarannya. Di sinilah perlunya dilakukan penyelarasan tradisi dan modernitas di tengah dunia pesantren.

Dalam hal ini, memang diperlukan adanya pembaharuan di pesantren, terutama mengenai metodologi pengajarannya, namun pembaharuan ini tidak harus meninggalkan praktek pengajaran lama (tradisional), karena memang di sinilah karakter khas dan indegenousitas pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Justru yang perlu dilakukan adalah, adanya konfigurasi sistemik dan kultural antara metodologi tradisional dengan metodologi konvensional-modern. Dengan demikian, penerapan metodologi pengajaran modern dan pembangunan kultur belajar yang dialogis-emansipatoris, bisa seirama dengan watak asli dari kultur pesantren.

Satu hal yang ditekankan, pembaharuan tersebut tidak boleh mendegradasi tradisi pondok pesantren yang sudah mengakar. Tradisi pesantren dengan kelebihan dan kekurangannya merupakan bagian dari khazanah budaya bangsa. Ia memiliki andil besar dalam mempribumisasikan Islam sehingga mudah dicerna dan terhindar dari benturan konfliktual pada masa awal kemunculan dan perkembangannya dengan budaya setempat, melalui cara pewarisan tradisi Islam abad Pertengahan dan akulturasi dengan budaya lokal. Dari sini kesinambungan (*continuity*) dan perubahan (*change*) mendapatkan porsi seimbang sebagai bentuk implementasi strategi akomodatif-transformatif. Tidak hanya itu, pesantren juga diakui telah berjasa dalam menumbuhkan masyarakat swadaya dan swasembada.

PENUTUP

Pondok pesantren menghadapi beberapa tantangan dalam rangka mempertahankan eksistensinya, salah satunya adalah kebermanfaatan santri di masyarakat, dan persaingan dengan output non pesantren. Namun, pondok pesantren juga melakukan inovasi yang berupa mendirikan sekolah umum di pondok pesantren supaya santri atau lulusan pondok pesantren mempunyai ijazah yang setara dengan lulusan lembaga non pesantren. Di samping itu, fungsi sekolah umum tersebut juga sebagai upaya peningkatan mutu output pesantren. Selain itu, upaya mewajibkan peserta didik untuk tinggal di pondok pesantren juga tidak kalah pentingnya, karena pesantren adalah tempat yang baik untuk pewarisan tradisi. Jadi diharapkan pesantrenisasi peserta didik tersebut membuahkan hasil yaitu terbentuknya karakter keislaman yang kokoh pada diri peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf, 2000. *Tuntunan Membangun Masjid*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, ed. Darmadi, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Imron, 1993. *Kepemimpinan Kiai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, Malang: Kalimasahada Press
- Arifin, M. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bull, Ronald Alan Lukens, 1997. *A Peacefull Jihad: Javanese Education and Religion Identity Construction*, Michigan: Arizona State University
- Dhofier, Zamakhsari, 1994. *Tradisi Pesantren; Studi pandangan Hidup kiai*, jakarta; LP3ES.
- Dirdjosandjoto Pradjarta, 1999. *Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa* Yogyakarta: LKiS,
- Gazalba, Sidi, 1989. *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, Cetakan V.
- Geertz, Clifford, 1983. *Abangan Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Jabali, Fuad, Jamhari, 2002. *LAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Lincoln, YS., Egon G. Guba, 1985. *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hill, Caifornia: Sage Publications.
- M.B, Miles, Huberman A. Mikel, 1992. *Qualitative Data Analisis*, Beverly Hills: SAGE Publication, Inc.
- Madjid, Nurcholis, 2006. *Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina,
- Mastuhu, 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS
- Mastuhu, 2003. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safiria Insania press

- Masyhud, M. Sulthon, Khusnuridho, 2006. *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Moleong, Lexy J., 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Noor, Mahpuddin, 2006. *Potret Dunia Pesantren: Lintasan Sejarah, Perubahan dan Perkembangan Pondok Pesantren*, Bandung: Humaniora.
- Riyanto, Yatim, 2001. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: SIC
- Supeno, Wahyudin, 1984. *Perpustakaan Masjid, Pembinaan dan Pengembangannya*, ed. Abdul Hamid, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahid, Salahuddin, 2011. *Transformasi Pesantren Tebuireng: Menjaga Tradisi di Tengah Tantangan*, Malang: UIN Maliki Press.
- Wirosardjono, Soetjipto, 1987. *The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*, Berlin: Fredrich-Naumann Stiftung. Indonesian Society for Pesantren and Community Development (P3M), and Technical University Berlin
- Wojowasito, S., 1972. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yasmadi, 2002. *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid terhadap Pendidikan Tradisional*, Ciputat Press: Jakarta
- Zuhairini, 1992. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.